ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and observe any obstacles that occur in BPKAD of Serang Regency while applying Accrual Based Government Accounting Standards, and the extent of the success of BPKAD in Serang Regency in applying accrual-based SAP, and what improvements are made by BPKAD Regency Attack in the face of obstacles that occur. The methodology used is a qualitative method to obtain new information that has not been found before. Data collection techniques using literature review, semi-structured interviews, and using data validity testing conducted diligently, triangulating techniques and sources to obtain consistent information from participants.

The results showed that BPKAD of Serang Regency had applied accrual-based Government Accounting Standards as stipulated in Government Regulation Number 71 of 2010 from the initial stipulation of the regulation. However, in carrying out this accrual basis, BPKAD of Serang Regency faces several obstacles namely, constraints from inadequate Human Resources and Lack of IT Personnel, the use of SIMRAL applications which are still many errors, and Maping of Account Codes.

Regarding transparency carried out by BPKAD, Serang Regency is generally in accordance with the law, but BPKAD of Serang Regency has not been maximal in providing transparency through its personal website, while related to accountability carried out by BPKAD, Serang Regency is no doubt this is reflected by the WTP opinion that won 8 times in a row.

The inspectorate auditor considers that accrual-based SAP is a good thing, but the inspectorate must also prepare the infrastructure for the success of the policy, and considers that the commitment of each employee is important for the success of accrual-based SAP.

Proposed improvement of the constraints that occur, BPKAD Serang Regency must continue to improve the quality of Human Resources and IT Personnel and improvements to the use of the SIMRAL application.

Keywords: Accrual Based Government Accounting, Human Resources, SIMRAL, Account Code Maping

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengamati kendala-kendala apa saja yang terjadi pada BPKAD Kabupaten Serang selama menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, dan sejauh mana keberhasilan BPKAD Kabupaten Serang dalam menerapkan SAP berbasis akrual, serta perbaikan apa saja yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Serang dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi. Metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif untuk memperoleh informasi yang baru yang belum ditemukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data menggunakan kajian literatur, wawancara semi terstruktur, dan menggunakan pengujian keabsahan data yang dilakukan secara tekun, melakukan triangulasi teknik dan sumber untuk mendapatkan informasi yang konsisten dari partisipan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa BPKAD Kabupaten Serang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dari sejak awal ditetapkannya peraturan tersebut. Namun, dalam menjalankan basis akrual ini, BPKAD Kabupaten Serang menghadapi beberapa kendala yaitu, kendala dari Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai dan Kekurangan Tenaga IT, penggunaan aplikasi SIMRAL yang masih banyak *error*, serta Maping Kode Rekening.

Terkait dengan transparansi yang dijalankan oleh BPKAD Kabupaten Serang secara umum sudah sesuai dengan undang-undang namun BPKAD Kabupaten Serang belum maksimal dalam memberikan transparansi melalui *website* pribadinya, sedangkan terkait dengan akuntabilitas yang dijalankan BPKAD Kabupaten Serang sudah tidak diragukan lagi hal ini tercermin dengan opini WTP yang diraih 8 kali berturut-turut.

Auditor inspektorat memandang bahwa SAP berbasis akrual adalah hal yang bagus, namun inspektorat juga harus menyiapkan insfrastruktur untuk keberhasilan kebijakan tersebut, serta memandangn bahwa komitmen dari setiap pegawai adalah hal yang penting untuk keberhasilan SAP berbasis akrual.

Usulan perbaikan dari kendala-kendala yang terjadi, BPKAD Kabupaten Serang harus terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Tenaga IT dan perbaikan terhadap penggunaan aplikasi SIMRAL.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Sumber Daya Manusia, SIMRAL, Maping Kode Rekening